

Perlunya Paradigma Baru dalam Pemberdayaan Perguruan Tinggi dalam Konteks Pembangunan Bangsa

Wayan Koster

Abstract: The low budget and equal opportunity in education which become the orientation of the education policies are resulted in the quality of universities in Indonesia which were lower than other Asian universities. Consequently, the development of professional human resources would not go smoothly. To resolve this, the government needs to apply a new paradigm to develop the universities by changing the orientation of education development policy, increasing the educational budget as well as declaring the universities as the center of nation development.

Kata kunci: pemberdayaan perguruan tinggi, paradigma baru, pembangunan bangsa.

Bangsa dan negara Indonesia tengah menghadapi cobaan besar yang ditandai oleh terpuruknya berbagai bidang kehidupan: ekonomi, politik, hukum, Hak Asasi Manusia, integritas, dan moral. Dalam suasana demikian, kini muncul lagi berita yang sangat mengagetkan dan menambah terpuruknya bangsa dan negara kita. *Asiaweek* (1999) melaporkan bagaimana terpuruknya mutu perguruan tinggi di Indonesia dibanding perguruan tinggi yang ada di Asia, Australia, dan Selandia Baru. Peringkat mutu perguruan tinggi ditentukan oleh besarnya skor total (*overall score*) masing-masing perguruan tinggi. Ada 9 indikator yang dinilai yaitu reputasi akademik,

Wayan Koster adalah mantan peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas, sekarang menjadi dosen Universitas Tarumanegara, Jakarta.

pilihan calon mahasiswa, sarana prasarana, penelitian, alokasi anggaran, perbandingan jumlah mahasiswa dengan jumlah dosen, persentase lulusan, publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah internasional, dan penggunaan internet. Penilaian dilakukan pada 77 universitas umum (multidisiplin) dan 39 universitas/institut sains dan teknologi di Asia, Australia, dan Selandia Baru.

Dari 77 universitas umum itu, Universitas Indonesia (UI) hanya menduduki peringkat 61, Universitas Gadjah Mada (UGM) peringkat 68, Universitas Diponegoro (UNDIP) peringkat 73, dan Universitas Airlangga (UNAIR) peringkat 75 (tiga dari bawah). Sedangkan dari 39 universitas/institut berciri sains dan teknologi, ITB hanya menduduki peringkat 21. Jika dilihat negaranya, sepuluh universitas umum yang *top* adalah dari Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Singapura, dan Australia; sedangkan sepuluh institut sains dan teknologi yang *top* adalah dari Korea Selatan, India, Jepang, Singapura, dan Cina. Yang sangat menarik untuk dicatat adalah ternyata dari sepuluh institut yang *top* itu lima di antaranya dari India. Di tingkat *ASEAN*, Indonesia masih kalah peringkat dengan Thailand, Malaysia, dan Philipina. *University of Malaya* (Malaysia) menduduki peringkat 47, *University of the Philippines* (Philipina) peringkat 48, *Prince of Songkla University* (Thailand) peringkat 53, dan *Putra University of Malaysia* peringkat 52. Fakta ini mengagetkan karena dahulu Malaysia meminta bantuan UI dan ITB untuk membangun universitasnya tetapi sekarang Indonesia justru telah tertinggal dalam mutu pendidikan dari Malaysia.

Dari sembilan indikator yang dinilai, yang agak menggembirakan hanya pada hasil penilaian untuk indikator pilihan calon mahasiswa. Ternyata ITB menduduki peringkat 1, UI peringkat 5, dan UGM peringkat 6. Artinya, dari 39 institut sains dan teknologi di Asia, ITB paling sulit dimasuki oleh calon mahasiswa; demikian halnya dari 77 universitas umum, perguruan tinggi yang paling sulit dimasuki oleh calon mahasiswa adalah UI dan UGM. Dari hasil penilaian untuk indikator lainnya, umumnya peringkat perguruan tinggi di Indonesia sangat rendah. Hal ini misalnya dapat dilihat dari hasil penilaian untuk 3 indikator berikut. Dalam hal sarana prasarana, UI menduduki peringkat 62, UGM peringkat 77 (paling rendah), UNDIP peringkat 76, dan UNAIR peringkat 74. Pada kategori institut, ITB menduduki peringkat 37 (nomor tiga dari bawah). Dalam melaksanakan penelitian, untuk kelompok universitas umum, UI menduduki peringkat 77 (paling bawah), UGM peringkat 69, UNDIP peringkat 59, UNAIR

peringkat 75, dan ITB peringkat 21 (Huda, 2000). Hal ini sangat mengecewakan karena penelitian merupakan kegiatan yang sangat penting di universitas. Dilihat dari publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah bertaraf internasional, Indonesia tertinggal sangat jauh: UI peringkat 71, UGM peringkat 76, UNDIP peringkat 73, dan UNAIR peringkat 77 (paling bawah), sementara ITB peringkat 36 (nomor 4 dari bawah). Rendahnya angka penelitian dan publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah internasional itu menunjukkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia masih jauh tertinggal sebagai pusat pengembangan ilmu dan teknologi. Dilihat dari alokasi anggaran pendidikan, UI berperingkat 76, UGM peringkat 73, UNDIP peringkat 69, dan UNAIR peringkat 72, sementara ITB peringkat 33. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pembangunan pendidikan pada perguruan tinggi adalah sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN PENDIDIKAN

Rendahnya mutu pendidikan pada jenjang perguruan tinggi atau pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah sangat terkait dengan kebijakan pemerintah dalam membangun pendidikan sejak Pelita I sampai dengan saat ini. Pada awal pembangunan nasional, pembangunan pendidikan diprioritaskan pada perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan pemerintah terutama dalam penyediaan anggaran pendidikan. Kebijakan tersebut telah memberikan hasil yang sangat mengesankan. Data menunjukkan bahwa, melalui program Inpres, pada jenjang sekolah dasar terjadi peningkatan jumlah peserta didik yang mencapai 227% dari 13 juta pada awal Pelita I menjadi 29,5 juta pada tahun 1993/1994. Angka partisipasi ini terus meningkat sehingga menjadi 110,8% pada akhir Pelita V.

Pada jenjang SLTP jumlah peserta didik naik dari 1,5 juta pada awal Pelita I menjadi 6,0 juta pada akhir Pelita V. Dengan angka tersebut, maka angka partisipasi kasar (APK) telah mencapai 54,4% pada akhir Pelita V. Pada jenjang SLTA, terjadi kenaikan peserta didik yang luar biasa (hampir mencapai empat kali lipat), yaitu dari 0,7 juta pada awal Pelita I menjadi 4,1 juta pada akhir Pelita V. Dengan data ini, ternyata APK pada jenjang SLTA telah mencapai 33,9% pada akhir Pelita V. Ke-

berhasilan dalam perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SD, SLTP, dan SLTA telah mengakibatkan adanya tuntutan yang semakin meningkat pada jenjang pendidikan tinggi. Jumlah mahasiswa telah meningkat dengan cukup tajam, yaitu dari 156.000 pada tahun 1968 menjadi hampir 14 kali lipatnya, yaitu 2,1 juta pada akhir Pelita V. Hal ini berarti bahwa APK pada tingkat pendidikan tinggi meningkat dari 1,6% menjadi 9,8% pada akhir Pelita V. Namun angka ini masih lebih rendah dari APK perguruan tinggi di beberapa negara tetangga seperti Thailand yang telah mencapai 19,6% dan Philipina yang mencapai 26,5%.

Dengan data tersebut, tampak bahwa hasil yang cukup menonjol dalam pembangunan pendidikan di Indonesia saat ini adalah keberhasilan dari kebijakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, terutama dalam mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi penduduk usia 7-12 tahun. Prestasi ini ternyata lebih cepat dibandingkan dengan sesama negara berkembang, bahkan juga dibandingkan dengan negara-negara industri maju sekalipun ketika mereka mengupayakan hal yang sama. Prestasi ini diakui oleh dunia internasional, sehingga UNESCO menganugerahkan Medali Avicenna (Ibnu Sina) kepada pemerintah pada bulan Juni 1993 (Hallak, 1990). Jika Indonesia hanya memerlukan waktu sekitar 20 tahun atau 4 periode Pelita untuk menuntaskan wajib belajar sekolah dasar, maka negara-negara industri maju memerlukan waktu sekitar rata-rata 60-100 tahun. Sepuluh tahun setelah pencanangan wajib belajar 6 tahun, Indonesia mencanangkan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP) yang merupakan kelanjutan dari persiapan yang telah dilaksanakan pada Pelita V. Menyadari pentingnya peranan pendidikan dasar, Pemerintah telah berhasil mencanangkan program Wajar Dikdas 9 tahun pada tanggal 2 Mei 1994, yang diharapkan tuntas dalam tiga Pelita atau 15 tahun kemudian (Bank Dunia, 1993).

Dengan prioritas kebijakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, yang menjadi korban adalah mutu pendidikan. Dengan keterbatasan anggaran pendidikan, pemerintah tidak mampu meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan sekaligus meningkatkan mutu pendidikan. Dilihat dari persentase anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan terhadap besarnya APBN, komitmen politik pemerintah dalam membangun pendidikan memang masih paling rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia termasuk ASEAN. Data menunjukkan bahwa besarnya alokasi anggaran terhadap APBN di

Indonesia sampai dengan tahun 1999 hanya mencapai sekitar 9%, sedangkan Malaysia mencapai 23%, Philipina 23%, Thailand 22%, dan Singapura 19%. Dengan demikian anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk membangun pendidikan tinggi juga menjadi sangat rendah, yang terlihat pada peringkat alokasi anggaran pendidikan untuk UI, UGM, UNDIP, UNAIR, dan ITB sebagaimana yang dilaporkan oleh *Asiaweek*.

India, Philipina, dan Malaysia sesungguhnya tidaklah terlalu kaya dibandingkan Indonesia, tetapi pemerintahnya memiliki komitmen yang jauh lebih tinggi dalam membangun pendidikan daripada pemerintah Indonesia sebagaimana terlihat dari alokasi anggaran untuk pendidikan. India, yang dari segi kemampuan ekonomi juga susah, mampu mengalokasikan anggaran cukup besar, yaitu Jawaharlal Nehru peringkat 33, *Indian Institute of Technology* (Bombay) peringkat 8, *Indian Institute of Technology* (Delhi) peringkat 13, *Indian Institute of Technology* (Madras) peringkat 14, dan *Indian Institute of Technology* (Kharagpur) peringkat 7. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah India sangat serius membangun pendidikan bagi bangsanya.

Rendahnya alokasi anggaran pendidikan merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Hal ini tercermin pada rendahnya hasil belajar siswa yang diukur dengan NEM pada jenjang SD, SLTP, dan SLTA. Bahkan untuk mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi, hasil belajar siswa sangat rendah sehingga kurang mendukung pengembangan ilmu dan teknologi. Demikian halnya mutu pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi adalah sangat rendah sebagaimana dilaporkan dalam *Asiaweek*.

Sejalan dengan dinamika pembangunan bangsa di berbagai sektor, tuntutan terhadap kemajuan pendidikan menjadi semakin meluas. Di satu pihak ada tuntutan untuk memenuhi kesempatan memperoleh pendidikan karena jumlah penduduk yang semakin bertambah dan di lain pihak muncul tuntutan yang baru tidak saja menyangkut peningkatan mutu pendidikan tetapi juga menyangkut peningkatan relevansi dan efisiensi pendidikan. Relevansi pendidikan berkaitan dengan kualifikasi lulusan yang dibutuhkan dalam berbagai lapangan pekerjaan untuk mendukung pembangunan nasional (Djojonegoro, 1992). Sampai saat ini relevansi pendidikan masih merupakan masalah yang sangat menonjol. Data menunjukkan bahwa struktur angkatan kerja terdidik masih didominasi oleh angkatan kerja berpendidikan rendah. Hal ini terlihat dari sebagian besar (79,52%) angkatan

kerja yang pendidikannya masih rendah yaitu tidak berpendidikan, tidak tamat SD, dan lulus SD. Sedangkan angkatan kerja yang berpendidikan SLTP ke atas masih sangat kecil yaitu hanya sekitar 8,94% lulusan SLTP, 9,75% lulusan SLTA, dan 5,96% lulusan pendidikan tinggi. Dengan demikian sebagian besar angkatan kerja masih memiliki keahlian dan keterampilan yang rendah sehingga dapat mengakibatkan rendahnya produktivitas sektor yang bersangkutan (Djojonegoro & Bishry, 1984).

Struktur angkatan kerja menurut pendidikan tersebut ternyata jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, terlebih lagi dengan negara-negara industri baru seperti Singapura, Taiwan, Korea Selatan, dan Hongkong. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan berbagai sektor pembangunan dapat ditunjukkan dengan daya serap sektor-sektor ekonomi yang sangat rendah terhadap lulusan pendidikan. Keadaan ini telah berlangsung sejak 1980 dan sampai dengan tahun 1990-an belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, bahkan mungkin terjadi kecenderungan yang semakin memburuk. Dalam menghadapi era industrialisasi yang berlandaskan iptek, relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan merupakan persyaratan mutlak sehingga sistem pendidikan mampu menyiapkan berbagai cabang keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh dunia usaha-industri. Kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah adalah memperluas pendidikan keterampilan dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja dengan maksud agar para lulusan dapat memperoleh pekerjaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tingkat pendidikan tinggi, pemerintah telah meningkatkan pendidikan keahlian dan profesi yang bermuatan teknologi tingkat tinggi guna memacu pertumbuhan produktivitas dan nilai tambah produksi dalam berbagai sektor ekonomi. Kedua tingkatan pendidikan kejuruan tersebut telah dikembangkan oleh pemerintah secara berimbang untuk menunjang sistem ekonomi agar dapat memiliki kemampuan dalam meningkatkan nilai tambah industri secara sektoral. Peningkatan relevansi pendidikan kejuruan dan keahlian profesi tersebut dimaksudkan agar kemampuan serap lapangan kerja terhadap lulusan pendidikan tinggi berdasarkan jenis-jenis keahlian dapat ditingkatkan. Keadaan daya serap lulusan perguruan tinggi saat ini tampaknya masih merupakan tantangan yang semakin penting dalam rangka meningkatkan kesesuaian program pendidikan tinggi dengan kebutuhan sektor-sektor ekonomi baik dalam jumlah maupun kualitasnya.

Apabila tidak dilakukan perubahan sistem pendidikan kejuruan/keahlian, diperkirakan akan terjadi kesenjangan yang semakin melebar. Oleh

karena itu, pemerintah telah mengembangkan suatu kebijakan yang mendekatkan pelaksanaan pendidikan keahlian dan profesi dengan kepentingan para pemakai lulusan. Hal ini dilakukan dengan pendekatan sistem ganda yaitu keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*). Dalam sistem ini, perusahaan sebagai pelaku ekonomi ikut serta merencanakan, menyusun kurikulum, melaksanakan pendidikan termasuk ikut serta melaksanakan penilaian keterampilan dan keahlian (Djojonegoro, 1992).

Dalam menghadapi perubahan jaman yang semakin dinamis dan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di berbagai sektor tersebut kebijakan pendidikan yang telah ditempuh oleh pemerintah adalah pembangunan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan relevansi dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan, termasuk pada pendidikan tinggi. Akan tetapi tampaknya kebijakan ini akan sulit terwujud karena sampai saat ini komitmen politik pemerintah dalam membangun pendidikan masih tetap rendah, yang terbukti dari tetap rendahnya alokasi anggaran untuk pendidikan dalam RAPBN tahun 2001. Ini berarti, kebijakan pendidikan masih merupakan retorika belaka yang belum didukung oleh anggaran pendidikan yang memadai.

MUTU PENDIDIKAN DAN KEMAJUAN BANGSA

Dari laporan *Asiaweek* jelas terlihat bahwa Jepang, Korea Selatan, dan India merupakan negara yang sangat berhasil dalam membangun pendidikan pada tingkat perguruan tinggi. Telah diketahui juga bahwa tiga negara ini telah cukup maju dalam membangun teknologi dan industri. Bahkan Korea Selatan dan Jepang telah tumbuh menjadi negara industri baru yang mampu menyaingi negara-negara industri di Eropa dan Amerika Serikat. Keadaan ini sangat terlihat dari membanjirnya mobil-mobil produk Jepang dengan berbagai merek serta produk-produk elektronika dan peralatan rumah tangga. Jepang juga telah sangat maju dalam bidang ekonomi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang spektakuler di dunia, sehingga membuat kewalahan Amerika Serikat. Mobil-mobil produk Korea Selatan pun sudah mulai membanjiri Indonesia.

Data empiris menunjukkan bahwa investasi pendidikan sebagai kegiatan penting pengembangan SDM terbukti memiliki sumbangan yang sangat

besar terhadap tingkat keuntungan ekonomi (*rate of return*). Data juga menunjukkan bahwa keuntungan dalam investasi pendidikan ternyata lebih tinggi daripada investasi fisik, dengan perbandingan rata-rata 15,3% dan 9,1% (McMahon & Boediono, 1992). Ini berarti bahwa investasi dalam pendidikan merupakan upaya yang menguntungkan baik secara sosial maupun ekonomis. Implikasinya adalah bahwa pemerintah harus terus diyakinkan dan didorong untuk meningkatkan anggaran belanja untuk membiayai pembangunan di bidang pendidikan. Data dari negara-negara dengan berbagai tingkat perkembangan ekonomi menunjukkan bahwa investasi pendidikan menunjukkan tingkat keuntungan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu rata-rata 18,4%, 13,1%, dan 10,9% (*social rate of return*) serta 29,1%, 18,1%, dan 20,3% (*private rate of return*) masing-masing untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi (McMahon & Boediono, 1992; Psacharopoulos & Woodhall, 1993). Jadi dapat dikatakan bahwa secara rata-rata investasi dalam pendidikan memberikan manfaat atau keuntungan ekonomi yang cukup tinggi baik bagi peserta didik maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa program pendidikan di negara-negara pada umumnya merupakan investasi yang cukup menguntungkan secara ekonomi. Tingkat keuntungan ekonomi bagi pribadi peserta didik ternyata secara konsisten jauh lebih tinggi daripada keuntungan sosial secara umum karena adanya subsidi pemerintah yang cukup tinggi terhadap biaya pendidikan.

Dari pengalaman negara industri maju, kontribusi tenaga kerja (SDM) dalam peningkatan produktivitas industri sangat menonjol atau paling tinggi dibandingkan dengan kontribusi faktor-faktor produksi lain seperti modal dan teknologi (Djojonegoro, 1992). Kontribusi faktor tenaga kerja di Korea dan Amerika Serikat adalah paling tinggi (40% dan 32%) dibandingkan dengan faktor lain. Sedangkan kontribusi faktor tenaga kerja di Jepang cukup menonjol (21%) yang ternyata sejajar dengan kontribusi faktor modal dan teknologi (24% dan 22%). Data tersebut menunjukkan pentingnya kualitas tenaga kerja atau sumber daya manusia dalam proses produksi.

Secara empiris dapat ditunjukkan bahwa pendidikan telah mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut hasil analisis sejumlah negara terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di Korea Selatan dan Taiwan selama tiga dekade terakhir ini terutama disebabkan oleh faktor pendidikan (Rodrik, 1994). Data menunjukkan bahwa selama 30 tahun, kedua negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,82%

dan 6,17% pertahun, sedangkan negara-negara lainnya berada jauh di bawah itu (-2,29% sampai -3,58%). Pertumbuhan sangat tinggi yang tidak dialami oleh negara-negara lainnya itu disebabkan oleh karena kedua negara tersebut memiliki tenaga kerja terdidik yang lebih baik. Pada saat itu kedua negara telah mencapai pendidikan tingkat SD secara universal (hampir dua dan satu setengah kali lipat dari perkiraan). Demikian halnya dengan pencapaian pendidikan tingkat sekolah lanjutan (hampir tiga dan dua setengah kali lipat), dan angka melek huruf penduduknya telah jauh melampaui angka perkiraan.

Pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan peranan pendidikan juga telah dibahas dalam laporan Bank Dunia yang berjudul *The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy* (1993). Laporan studi Bank Dunia tersebut mengkaji secara analisis tentang pembangunan negara-negara di dunia. Dari kajian itu ditemukan bahwa beberapa negara Asia Timur yang memiliki prestasi sangat mengesankan dalam laju pertumbuhan ekonominya, melebihi apa yang dicapai oleh negara-negara lain di dunia. Sedemikian tinggi dan konsistennya prestasi pembangunan negara-negara itu, sehingga disebut sebagai negara yang membuat "keajaiban". Negara-negara yang oleh Bank Dunia disebut *High Performing Asian Economies (HPAEs)* tersebut terdiri dari Jepang pada peringkat teratas, disusul oleh keempat "Macan Asia" (Korsel, Taiwan-China, Hongkong, Singapura), dan kemudian negara-negara yang digolongkan sebagai *The Newly Industrializing Economies (NIEs)*, yaitu Malaysia dan Thailand.

Sejak 1960, pertumbuhan ekonomi negara-negara itu dua kali lebih cepat dari negara-negara Asia Timur lainnya, tiga kali lebih cepat dari kebanyakan negara Amerika Latin dan Asia Selatan, dan lima kali lebih cepat dibanding umumnya negara-negara Afrika. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara industri lainnya serta negara-negara kaya penghasil minyak di Timur Tengah dan Afrika Utara, tingkat pertumbuhan yang dicapai delapan *HPAEs* itu masih lebih tinggi. Laporan itu juga mencatat, negara-negara tersebut mampu meningkatkan pemerataan hasil pembangunannya, terutama di bidang ekonomi, yang ditunjukkan oleh koefisien Gini sebagai indikator pemerataan. Secara lebih rinci, dikemukakan kunci keberhasilan negara-negara *HPAEs* itu, yaitu meningkatnya peranan sektor swasta, tepatnya kebijakan pengembangan sumber daya manusia, tingginya tabungan masyarakat yang ikut membiayai pembangunan, semakin produktifnya sektor pertanian, semakin meningkatnya tingkat pendidikan, dan

bersamaan dengan itu, semakin menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk.

Secara khusus, laporan itu mencatat bahwa ternyata pendidikan memiliki peranan yang sangat besar dalam pembangunan, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi. Bersama-sama dengan besarnya investasi yang melebihi 20% dari pendapatan kotor (PDB) dan investasi sektor swasta yang juga besar, sektor pendidikan secara akumulatif memberikan kontribusi sekitar dua pertiga terhadap terjadinya keajaiban tersebut.

Secara umum ada dua hal yang dapat diungkap dari uraian di atas. Pertama, tingkat kemajuan suatu bangsa dalam bidang teknologi dan ekonomi sangat ditentukan oleh mutu pendidikannya. Alasannya, dengan mutu pendidikan yang tinggi, mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh suatu bangsa akan bermutu tinggi juga yaitu ahli, terampil, kreatif, dan inovatif. Kedua, pemerintah di negara yang telah maju tersebut tidak saja memiliki komitmen yang tinggi dalam membangun pendidikan, tetapi juga mampu membangun kerjasama yang konstruktif dengan institusi perguruan tinggi dengan mendayagunakan perguruan tinggi sebagai sentra-sentra pembangunan di bidang ilmu dan teknologi dalam rangka membangun bangsanya. Dengan kata lain, pemerintah di negara yang telah maju mampu memanfaatkan perguruan tinggi sebagai salah satu potensi yang menjadi motor penggerak pembangunan bangsa.

Kenyataan ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia selama pemerintahan Orde Baru. Pemerintah tidak saja memiliki komitmen yang rendah terhadap pembangunan pendidikan, tetapi juga tidak atau kurang mau memanfaatkan perguruan tinggi secara institusional sebagai sarana dalam pembangunan ilmu, teknologi, dan industri. Bahkan pemerintah cenderung menerapkan pola represif terhadap kampus akibat dinamika mahasiswa, dengan menjauhi atau memusuhi kampus. Suatu kebiasaan yang jelek di Indonesia adalah bahwa jika yang salah orangnya (oknum) maka yang turut dihukum adalah institusinya. Inilah yang menjadi salah satu penyebab perguruan tinggi tidak mampu berperan secara optimal dalam kondisi yang serba terbatas untuk melahirkan sumber daya manusia yang ahli, terampil, kreatif, dan inovatif. Inilah salah satu kelemahan besar dari pemerintahan Orde Baru selama 30 tahun lebih. Singkat kata, selama masa Orde Baru berkuasa, pemerintah tidak mau mengembangkan kerjasama yang konstruktif dengan institusi perguruan tinggi. Kerjasama yang dilakukan hanya terbatas pada pemanfaatan tenaga secara individual.

DAMPAK BAGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN INDONESIA

Akibat yang nampak langsung saat ini adalah Indonesia sangat tertinggal dalam membangun ilmu, teknologi, dan industri serta ekonomi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, bahkan pada lingkup *ASEAN*. India telah mampu membuktikan diri sebagai negara yang maju dalam bidang teknologi yaitu mampu membuat dan meluncurkan pesawat ulang-alik. Malaysia juga telah tumbuh menjadi negara industri elektronika dan teknologi multimedia. Mereka tidak mengembangkan industri yang berbasis teknologi tinggi, tetapi berbasis teknologi menengah sebagai bagian dari strategi dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara industri maju lainnya. Thailand telah sangat maju dalam mengembangkan teknologi pertanian sehingga mampu menghasilkan buah-buahan yang berkualitas tinggi seperti durian, pepaya, jambu yang juga sudah masuk ke pasar Indonesia. Mereka juga mengembangkan industri yang tidak berbasis teknologi tinggi, tetapi berbasis teknologi menengah.

Indonesia mau *gagah-gagahan* untuk kepentingan politis pejabat saat itu, dengan mengembangkan industri berbasis teknologi tinggi di IPTN dengan biaya yang sangat besar. Hasilnya, pesawat produk IPTN akhirnya harus ditukar dengan ketan karena kalah bersaing dengan pesawat yang diproduksi oleh negara yang memang sudah sangat maju dalam bidang industri berbasis teknologi tinggi. Meskipun memiliki lahan pertanian yang luas, perkebunan, dan sayur-sayuran yang beraneka ragam, pemerintah Indonesia tidak mau mengembangkan teknologi yang berbasis teknologi menengah untuk mendukung kemajuan pertanian dan agro-industri. Padahal sebagian besar rakyat Indonesia hidup dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Menjadi sangat ironis, di Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris dengan berbagai macam hasil pertanian dan perkebunan, kualitas buah-buahannya kalah bersaing dengan buah-buahan dari Bangkok!

Dampak lain dari rendahnya mutu pendidikan adalah mutu SDM juga rendah sehingga pada level pekerjaan tertentu bangsa Indonesia belum memiliki tenaga profesional yang ahli, terampil, kreatif, dan inovatif. Tenaga-tenaga ahli dari Indonesia belum siap bersaing dalam menghadapi persaingan global. Hal ini terlihat dari membanjirnya tenaga-tenaga profesional dari luar negeri yang digunakan tidak saja oleh pemerintah di berbagai instansi seperti sebagai konsultan, tetapi juga oleh pihak perusahaan swasta. Bahkan manajer-manajer hotel pun sudah dipegang oleh orang asing. Data menunjukkan bahwa Indonesia harus mengeluarkan biaya sekitar 5 milyar

dolar tiap tahun untuk menyewa tenaga ahli asing karena SDMnya kurang berkualitas. Pertanyaannya, mau dibawa ke manakah sarjana, lulusan perguruan tinggi yang jumlahnya mencapai ratusan ribu tiap tahun? Inilah tantangan besar yang harus dijawab terutama oleh pemerintah sekarang untuk tidak membiarkan bangsa ini terus tertinggal di berbagai bidang ekonomi, teknologi, industri, dan budaya.

PENUTUP

Mutu perguruan tinggi di Indonesia ternyata sangat rendah bila dibandingkan dengan mutu perguruan tinggi di Asia. Hal ini terkait dengan kebijakan makro pembangunan pendidikan yaitu perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, dan anggaran yang dialokasikan relatif rendah. Rendahnya mutu pendidikan menghambat upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kualifikasi keahlian, keterampilan, kreativitas, dan sikap inovatif serta mampu bersaing dalam konteks global.

Pemerintah perlu mencari dan menerapkan prioritas paradigma baru dalam membangun pendidikan di berbagai jenjang, terutama pada jenjang perguruan tinggi. Perubahan paradigma itu mencakup tiga aspek yaitu perubahan orientasi kebijakan pendidikan, peningkatan komitmen politik pemerintah dalam bidang pendidikan, dan pengembangan kerjasama yang konstruktif dengan perguruan tinggi.

Pemerintah perlu meningkatkan komitmen politiknya dalam membangun pendidikan yang tercermin pada alokasi anggaran pendidikan dalam lingkup Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dengan porsi paling tidak mencapai 20% dari total APBN. Dalam hal ini pemerintah perlu mengalokasikan anggaran dengan jumlah yang memadai untuk pengembangan perguruan tinggi yang meliputi peningkatan mutu dosen, peningkatan gaji dan insentif bagi para dosen, pengadaan laboratorium, perpustakaan dan sarana lainnya. Selain itu pemerintah perlu memberi jumlah anggaran yang memadai untuk kegiatan penelitian bagi para dosen, baik penelitian yang berkaitan dengan kebutuhan langsung pembangunan maupun penelitian yang bersifat teoretis untuk pengembangan ilmu dan teknologi.

Pemerintah perlu mengembangkan iklim yang kondusif bagi perguruan tinggi, dengan tidak lagi menerapkan pola-pola yang cenderung represif yang selama ini membelenggu kebebasan mimbar akademik di masing-

masing perguruan tinggi, yaitu mendorong sivitas akademika berkarya secara kreatif, memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk beraktivitas dan menentukan sendiri bentuk organisasi kemahasiswaan yang tidak perlu dibuat seragam antarperguruan tinggi sejalan dengan otonomi perguruan tinggi dan pelaksanaan otonomi daerah.

Pemerintah juga perlu membangun hubungan kerjasama yang konstruktif dengan memanfaatkan perguruan tinggi secara institusional sebagai wahana dan motor untuk melakukan penelitian, pengkajian, dan pengembangan konsep pembangunan bangsa di bidang ekonomi, pertanian, industri, dan teknologi yang sesuai dengan potensi dan sumber daya alam bangsa Indonesia. Di samping itu perlu dikembangkan budaya baru yang mendorong profesi di bidang pendidikan sejajar dengan profesi birokrat, politisi atau pengusaha sehingga potensi pengembang ilmu dan teknologi bangsa Indonesia ke depan lebih maju.

DAFTAR RUJUKAN

- Asiaweek. 1999, 23 April. *About the Rankings: The 1999 Asia's Best Universities List Criteria, plus Other Notes*. <http://www.pathfinder.com/asiaweek/universities/about.html>.
- Djojonegoro, W. 1992. *Pendidikan dan Produktivitas Industri*. Makalah dipresentasikan pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II, Medan 4-8 Februari 1992.
- Djojonegoro, W. & Bishry, R. 1984. *Produktivitas Pekerja di Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Hallak, J. 1990. *Educational Planning*. Paris: Unesco.
- Huda, N. 2000. Penelitian dan Publikasi Ilmiah. Dalam A. Saukah dan M.G. Waseso (Eds.), *Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah* (hlm. 1-13). Malang: UM Press.
- McMahon, W.W. & Boediono. 1992. Universal Basic Education: An Overall Strategy of Investment Priorities for Economic Growth. *Economic of Education Review*, 2 (11): 137-151.
- Psacharopoulos, G. & Woodhall, M. 1993. *Education for Development: An Analysis of Investment Choices*. Washington, D.C.: Oxford University Press.
- Rodrik, D. 1994. *Getting Interventions Right: How South Korea and Taiwan Get Rich*. Cambridge: NBER Inc.
- World Bank. 1993. *The East Asia Miracle*. Oxford: Oxford University Press.